

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA MAKANAN BERGIZI GRATIS PADA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN: STUDI KASUS DI KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nur Ariyani<sup>1</sup>, Herman Dema<sup>2</sup>, Irwan Irwan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia

Email: [nurariyani64@gmail.com](mailto:nurariyani64@gmail.com)

## Abstrak

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis nasional untuk meningkatkan kecukupan gizi dan kapasitas belajar peserta didik melalui intervensi makanan di sekolah. Efektivitas program ini sangat bergantung pada kualitas implementasi dan tata kelola di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi dan tata kelola MBG pada satuan pendidikan di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana dengan bantuan NVivo serta diuji melalui triangulasi dan member checking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MBG dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, dengan sumber daya dan disposisi sebagai faktor dominan. Dari perspektif tata kelola, pelaksanaan program telah mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas, meskipun masih terdapat keterbatasan pada komunikasi formal dan fleksibilitas birokrasi. Keberhasilan MBG ditentukan oleh integrasi kapasitas implementasi dan penerapan good governance di tingkat satuan Pendidikan.

**Kata Kunci:** Makanan Bergizi Gratis, Implementasi Kebijakan, Tata Kelola

## Abstract

*The Free Nutritious Food Program (MBG) is a national strategic policy to improve the nutritional adequacy and learning capacity of students through food intervention in schools. The effectiveness of this program is highly dependent on the quality of implementation and governance at the local level. This study aims to analyze the implementation and governance of MBG in educational units in Baranti Subdistrict, Sidrap Regency. The approach used is qualitative with a case study design. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana with the help of NVivo and tested through triangulation and member checking. The results show that the implementation of MBG is influenced by communication, resources, the disposition of implementers, and bureaucratic structure, with resources and disposition being the dominant factors. From a governance perspective, the program's implementation has reflected the principles of transparency, accountability, participation, and responsiveness, although there are still limitations in formal communication and bureaucratic flexibility. The success of MBG is determined by the integration of implementation capacity and the application of good governance at the educational unit level.*

**Keywords:** Free Nutritious Food, Policy Implementation, Governance

## A. PENDAHULUAN

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi prioritas strategis nasional yang diarahkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia melalui intervensi gizi pada peserta didik sejak usia sekolah. Program ini hadir sebagai respons terhadap tingginya prevalensi kekurangan gizi, ketimpangan kualitas pendidikan, serta kerentanan ketahanan pangan keluarga di berbagai daerah (Adam et al., 2024). Secara konseptual, MBG tidak sekadar tertuju pada pencapaian kecukupan gizi anak, melainkan juga diarahkan untuk meningkatkan konsentrasi belajar, motivasi akademik, serta kualitas kesehatan jangka panjang peserta didik. Dengan demikian, program ini diproyeksikan menjadi instrumen penting dalam memperkuat fondasi pembangunan manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan secara simultan.

Namun demikian, implementasi kebijakan MBG pada tingkat lokal tetap menjumpai beragam hambatan sistemik serta manajerial. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, mutu layanan yang belum konsisten, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan program menjadi hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan (Sadag, 2025). Dalam konteks Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, kompleksitas tersebut terlihat dari terbatasnya jumlah dapur yang beroperasi aktif, variasi pelaksanaan antar satuan pendidikan, serta distribusi yang belum merata sehingga berdampak pada ketidaksetaraan penerimaan manfaat (Satika et al., 2024). Keadaan tersebut menekankan bahwa nasib kebijakan sangat ditentukan oleh kondisi lokal, kemampuan pelaksana, dan struktur kelembagaan yang beroperasi di lapangan (Di Prima et al., 2022).

Relevansi penelitian ini terletak pada besarnya kebutuhan dalam meninjau proses secara komprehensif bagaimana implementasi dan tata kelola program MBG berlangsung pada tingkat satuan pendidikan. Meskipun dirancang sebagai kebijakan nasional, efektivitas MBG sepenuhnya dikendalikan oleh efektivitas implementasi di wilayah terkait. Oleh sebab itu, tinjauan atas faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai elemen utama implementasi kebijakan menjadi penting untuk menilai sejauh mana program berjalan sesuai tujuan (Agu et al., 2023). Selain itu, pendekatan tata kelola berbasis prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan efektivitas perlu dievaluasi guna memastikan program dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab, dan berkelanjutan (Di Prima et al., 2022). Tanpa tata kelola yang baik, potensi program dalam meningkatkan kualitas gizi dan pendidikan berisiko tereduksi oleh persoalan koordinasi, distribusi, maupun pengawasan.

Berpijak pada uraian tersebut, penelitian ini diarahkan guna memaparkan proses implementasi program MBG berdasarkan empat faktor utama implementasi kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan menganalisis tata kelola pelaksanaan program MBG di satuan pendidikan Kecamatan Baranti berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, sekaligus memetakan elemen pendorong dan kendala yang berdampak pada keberhasilan implementasi tersebut. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur implementasi kebijakan dengan mengintegrasikan model Edwards III dan perspektif *good governance* dalam satu kerangka analitis yang komprehensif (Immaculee & Amolo, 2025). Secara empiris, penelitian ini menghadirkan gambaran aktual pelaksanaan MBG di wilayah pedesaan Kabupaten Sidrap yang masih minim kajian akademik (Odoh et al., 2024)). Secara aplikatif, hasil penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan masukan berlandaskan fakta untuk pemerintah daerah, sekolah, dan pengelola program untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan efektivitas implementasi, serta menjamin keberlanjutan Program MBG selaku komponen dari langkah peningkatan kualitas layanan pendidikan dan gizi anak.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Makanan Bergizi Gratis

Program Makanan Bergizi Gratis atau school feeding program merupakan intervensi strategis yang bertujuan meningkatkan status gizi, kesehatan, dan kapasitas belajar peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi di lingkungan sekolah (Cupertino et al., 2022). Secara global, program tersebut terkonfirmasi memberikan kontribusi signifikan bagi bertambahnya partisipasi kehadiran, daya fokus belajar siswa, serta ketahanan pangan keluarga, dan telah dipromosikan oleh berbagai lembaga internasional seperti World Food Programme dan UNICEF (Canillo & Alferez, 2025).

Di Indonesia, program tersebut selaras dengan komitmen pemerintah dalam mendongkrak mutu edukasi serta kesejahteraan fisik anak sebagai bagian dari investasi pembangunan jangka panjang. Namun implementasinya sering menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dapur, variasi kualitas distribusi makanan, rendahnya kapasitas pelaksana, serta lemahnya monitoring dan pengawasan (Tamiru et al., 2024). Kondisi tersebut membuktikan bahwa efektivitas program tidak semata-mata dipengaruhi oleh kebijakan di level pusat, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan daerah dan satuan pendidikan dalam menjalankan program secara konsisten dan terstandar (Amiruddin Setiawan et al, 2025).

### 2. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menjadi tingkatan vital pada siklus kebijakan publik, dengan tugas mengubah kesepakatan politik menjadi aktivitas riil di lapangan (Kania et al., 2019) yang mengembangkan teori Edward III menyatakan bahwasanya tercapainya implementasi sangat bergantung pada empat pilar mendasar, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut menjadi penentu efektivitas sebuah kebijakan dalam meraih sasaran yang telah ditetapkan. Dalam lingkup kebijakan sosial, implementasi tidak sekadar bertumpu pada ketegasan regulasi, melainkan juga pada kemampuan kelembagaan dan koordinasi antaraktor yang terlibat (De Arruda Leite, 2016).

Grindle (2017) menegaskan bahwa proses implementasi adalah arena negosiasi antara kepentingan politik, kapasitas organisasi, dan kondisi sosial masyarakat. Di Indonesia, dinamika ini sangat terlihat dalam pelaksanaan kebijakan publik di bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk program makanan bergizi gratis, di mana faktor sumber daya manusia dan koordinasi lintas lembaga menjadi tantangan utama dalam memastikan efektivitas kebijakan (Hidayat & Aminah, 2022)

### 3. Teori Tata Kelola (*Good Governance*)

Tata kelola merupakan suatu sistem dan mekanisme penentuan langkah yang menyertakan beragam elemen birokrasi, dunia usaha, serta publik guna meraih sasaran kolektif melalui mekanisme transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas (Rhodes, 2017). Tata kelola menggambarkan pola interaksi yang kompleks antara aktor negara dan nonnegara dalam mengelola urusan publik di luar kontrol hierarkis pemerintah tradisional. Dalam perspektif kebijakan publik modern, tata kelola menekankan prinsip kolaborasi, transparansi, efektivitas, serta tanggung jawab sosial dalam setiap tahapan pelaksanaan kebijakan (Putra, 2020). Dengan demikian, tata kelola tidak hanya berkaitan dengan struktur pemerintahan formal, tetapi juga dengan kemampuan berbagai berbagai agen untuk berkoordinasi secara efektif dalam merumuskan kebijakan yang tanggap, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun dari asumsi bahwa efektivitas Program Makanan Bergizi Gratis dipengaruhi oleh interaksi antara implementasi kebijakan dan tata kelola pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan. Implementasi kebijakan melalui

komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi menilai tingkat keberhasilan kebijakan saat dioperasionalkan sesuai desain awal (Zakiyah et al., 2021).

Sementara itu, tata kelola berbasis prinsip *good governance* memperkuat mekanisme pelaksanaan melalui keterbukaan informasi, partisipasi aktor, akuntabilitas pelaksana, responsivitas terhadap kebutuhan lapangan, dan efektivitas tindakan. Hubungan kedua aspek tersebut diperkirakan menghasilkan tingkat keberhasilan program yang berbeda-beda pada tiap sekolah (Wahyudi et al., 2024). Dengan demikian, diagram konseptual penelitian menggambarkan bahwa implementasi kebijakan memengaruhi kualitas tata kelola, dan kedua variabel tersebut secara bersama-sama menentukan efektivitas penyelenggaraan MBG di Kecamatan Baranti.

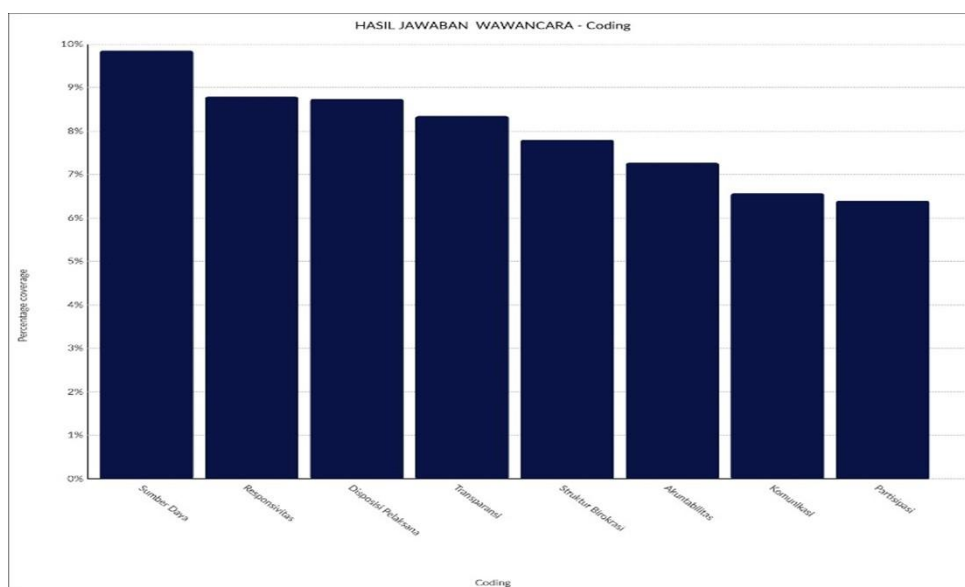
### C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada satuan pendidikan di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, yang dipilih secara *purposive sampling* karena menjadi lokasi awal implementasi Program MBG dengan karakteristik pelaksanaan yang beragam. Informan penelitian meliputi siswa, guru, kepala sekolah, kepala SPPG MBG, serta koordinator MBG kecamatan yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program. Data diperoleh melalui wawancara terperinci, pemantauan langsung di sekolah dan dapur pemasok hidangan, serta analisis berkas kebijakan dan laporan pengerjaan MBG. Proses pengolahan data menerapkan model analisis interaktif (Miles et al., 2014) yang memuat reduksi data, penyajian data tematik, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan selama proses penelitian. Penggunaan perangkat lunak NVivo mendukung konsistensi pengkodean dan visualisasi keterkaitan temuan. Kredibilitas data ditingkatkan melalui triangulasi data dan cara, serta konfirmasi balik kepada informan guna memastikan keselarasan analisis penelitian dengan praktik konkret pelaksana dan penerima program (Creswell, 2018). Pendekatan ini menghasilkan pemetaan utuh terhadap implementasi dan tata kelola Program Makanan Bergizi Gratis dalam konteks lokal Baranti.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Baranti menunjukkan dinamika implementasi kebijakan yang tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara faktor teknis administratif dan standar pengelolaan birokrasi yang berkualitas. Berdasarkan hasil penelitian, struktur pelaksanaan MBG melibatkan pemerintah pusat sebagai perumus kebijakan, pemerintah daerah sebagai koordinator wilayah, serta satuan pendidikan sebagai titik layanan utama (*delivery point*). Pihak sekolah tidak sekadar menjadi objek penerima manfaat program, namun juga sebagai pelaksana administratif yang melakukan pendataan siswa, pengaturan distribusi, pengawasan konsumsi makanan, serta pelaporan berkala. Alur tersebut menegaskan bahwa kelancaran implementasi kebijakan sangat berkaitan dengan kapasitas aktor di tingkat bawah (*street-level implementers*), khususnya dalam mengelola proses distribusi dan memastikan standar program berjalan sesuai ketentuan.

Hasil analisis data menggunakan teknik coding berbantuan NVivo, diperoleh distribusi kategori implementasi kebijakan sebagaimana tertera pada Gambar 1 berikut:



**Gambar 1. Diagram Batang Persentase**

Sumber: Hasil Analisis NVivo, 2026.

Berdasarkan hasil pengkodean (coding) jawaban wawancara yang ditampilkan pada Gambar di atas, empat aspek utama yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Data memaparkan bahwa keempat poin utama tersebut memiliki tingkat kemunculan yang berbeda-beda dalam pernyataan informan, yang merefleksikan tingkat perhatian, pengalaman, serta persepsi informan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, temuan penelitian memperlihatkan bahwa empat variabel utama yang memiliki kontribusi berbeda terhadap efektivitas pelaksanaan MBG. Di antara keempat variabel tersebut, sumber daya muncul sebagai faktor yang paling dominan dalam hasil pengkodean wawancara. Dominasi ini mencerminkan bahwa isu ketersediaan tenaga pelaksana, sarana prasarana pendukung, logistik distribusi, serta dukungan administratif menjadi perhatian utama para informan. Ketika sumber daya tersedia secara memadai, distribusi makanan dapat dilakukan tepat waktu, kualitas makanan dapat diawasi sesuai standar, dan proses evaluasi dapat dilaksanakan secara rutin. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya berpotensi mengganggu kesinambungan program. Temuan ini menguatkan argumen dalam literatur implementasi kebijakan bahwa kecukupan sumber daya merupakan prasyarat mendasar bagi keberhasilan kebijakan publik, terutama pada program sosial yang membutuhkan koordinasi operasional harian.

Selain sumber daya, disposisi pelaksana juga menjadi variabel penting yang memengaruhi konsistensi pelaksanaan program. Disposisi pelaksana mencakup pandangan, loyalitas, pengertian, serta skala dukungan aparat pada kebijakan dalam implementasi tersebut. Temuan penelitian memaparkan bahwa sewaktu pihak pelaksana memiliki sikap positif dan komitmen tinggi, pelaksanaan program cenderung berjalan lebih lancar dan adaptif terhadap kendala lapangan. Namun demikian, terdapat perbedaan tingkat pemahaman dan komitmen antar pelaksana yang berdampak pada ketidakkonsistenan penerapan standar operasional. Fakta ini memaparkan bahwa implementasi kebijakan bukan sekadar didasari oleh draf formal kebijakan, melainkan juga oleh faktor psikologis serta normatif dari pelaksana di lapangan. Dengan demikian, keberhasilan MBG di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh internalisasi nilai dan tujuan kebijakan oleh para pelaksana.

Variabel komunikasi dalam penelitian ini menunjukkan karakteristik yang relatif unik. Komunikasi antaraktor baik antara pengelola dapur, aparat kecamatan, maupun pihak sekolah secara umum berjalan aktif dan responsif. Namun, komunikasi tersebut lebih banyak

berlangsung secara informal dibandingkan melalui sistem dokumentasi formal yang terstruktur. Kondisi ini menimbulkan potensi perbedaan interpretasi kebijakan dan ketergantungan pada komunikasi personal. Dalam konteks implementasi kebijakan, komunikasi yang tidak terdokumentasi secara sistematis berisiko menimbulkan inkonsistensi standar pelaksanaan serta kesulitan dalam melakukan evaluasi berbasis data. Oleh karena itu, meskipun komunikasi interpersonal berjalan baik, penguatan sistem komunikasi formal menjadi kebutuhan penting untuk menjamin keberlanjutan program secara institusional.

Sementara itu, struktur birokrasi menjadi variabel yang berfungsi ganda sebagai pendukung sekaligus penghambat implementasi. Struktur organisasi yang jelas membantu mendefinisikan pembagian tugas dan tanggung jawab antarunit. Namun, struktur yang berlapis dan hierarkis menyita waktu pengambilan keputusan, utamanya di tengah situasi yang mendesak jawaban praktis terhadap kendala distribusi atau kualitas makanan. Dalam konteks program yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat, fleksibilitas birokrasi menjadi faktor krusial. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sosial tidak hanya membutuhkan kepastian prosedural, tetapi juga adaptabilitas struktural terhadap dinamika lapangan.

Penelitian ini juga menempatkan temuan dalam kerangka *good governance* yang memuat prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta responsivitas. Dari sisi transparansi, pelaksanaan MBG di Kecamatan Baranti telah menunjukkan adanya penyampaian informasi terkait jadwal distribusi, standar mutu makanan, serta mekanisme pelaksanaan kepada pihak sekolah. Namun, penyampaian informasi tersebut masih dominan secara lisan dan belum sepenuhnya terdokumentasi secara formal. Variasi tingkat keterbukaan antar sekolah menunjukkan bahwa transparansi belum terinstitusionalisasi secara merata. Padahal, dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi merupakan fondasi untuk membangun kepercayaan dan legitimasi program publik.

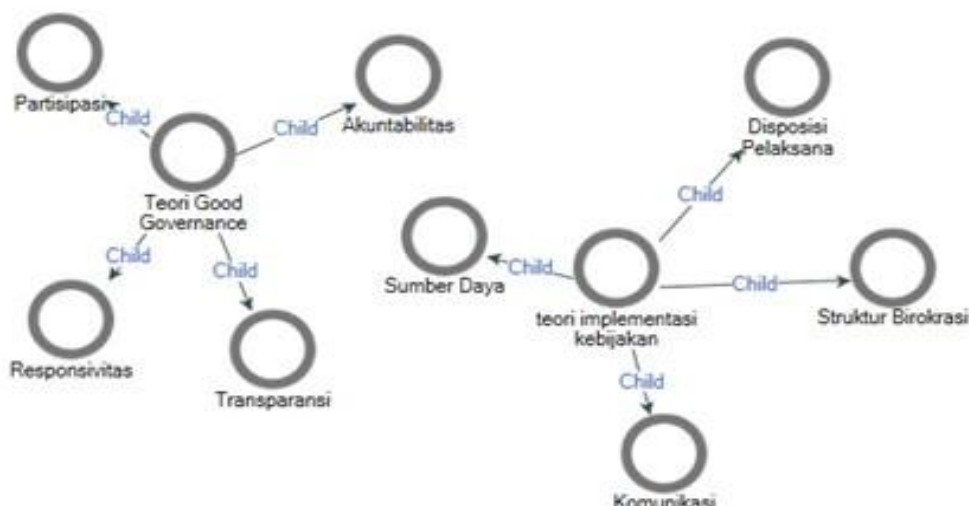
Prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan MBG tercermin dari adanya mekanisme pelaporan dan evaluasi berkala yang dilakukan oleh pengelola program kepada instansi yang lebih tinggi. Evaluasi kualitas makanan dan ketepatan distribusi menunjukkan adanya pertanggungjawaban administratif terhadap penggunaan sumber daya. Meskipun demikian, akuntabilitas kepada masyarakat sebagai penerima manfaat masih bersifat terbatas karena belum tersedia mekanisme umpan balik formal yang sistematis. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas vertikal (kepada atasan) relatif lebih kuat dibandingkan akuntabilitas horizontal (kepada Masyarakat).

Dari sisi partisipasi, penelitian ini menemukan bahwa sekolah dan masyarakat terlibat dalam proses evaluasi melalui pemberian masukan dan penyampaian keluhan. Partisipasi tersebut memperkaya informasi bagi pengelola program dan memungkinkan adanya perbaikan berbasis kebutuhan lapangan. Namun, bentuk partisipasi yang terjadi masih bersifat konsultatif dan belum sampai pada tahap pengambilan keputusan strategis. Dengan kata lain, masyarakat berperan sebagai pemberi masukan, tetapi belum menjadi aktor yang memiliki pengaruh langsung dalam perumusan kebijakan program.

Responsivitas pelaksana dalam menanggapi keluhan dan kendala distribusi menunjukkan bahwa terdapat upaya untuk menyesuaikan pelaksanaan program dengan kebutuhan sekolah. Ketika terjadi keterlambatan atau masalah kualitas makanan, pengelola melakukan koordinasi untuk mencari solusi. Namun, tingkat responsivitas masih dipengaruhi oleh kelancaran komunikasi dan fleksibilitas struktur birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa responsivitas sebagai prinsip *good governance* tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh kapasitas implementasi kebijakan secara teknis.

Untuk mengidentifikasi tema dominan dalam aspek tata kelola, dilakukan analisis *word frequency* berbantuan NVivo sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.





**Gambar 3. Model Konseptual Hasil Coding**

Sumber: Hasil Analisis NVivo, 2026.

Berdasarkan pemodelan konseptual pada gambar, Teori Good Governance dan Teori Implementasi Kebijakan diposisikan sebagai konsep induk yang saling beririsan dalam menjelaskan realisasi program MBG. Secara kolektif, penelitian ini membuktikan bahwasanya keberhasilan Program MBG di Kecamatan Baranti tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu pendekatan teoretis. Integrasi antara teori implementasi kebijakan dan konsep good governance memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan program. Faktor pendukung utama implementasi meliputi komunikasi yang relatif aktif, ketersediaan sumber daya yang memadai, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta partisipasi sekolah dan masyarakat. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi struktur birokrasi yang kurang fleksibel, perbedaan disposisi pelaksana, dan lemahnya sistem komunikasi formal.

Penelitian terdahulu pada umumnya menempatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan yang berdampak pada peningkatan motivasi belajar dan kesehatan siswa. Drake et al. (2016) menekankan pentingnya tata kelola dan pembiayaan berkelanjutan dalam keberhasilan program feeding school, sementara Susanto et al. (2020), serta Merlinda & Yusuf (2025) lebih berfokus pada dampak program terhadap motivasi dan semangat belajar siswa. Hidayat & Aminah (2022) mulai mengkaji aspek implementasi dengan menyoroti keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi sebagai kendala utama, sedangkan Setiawan et al. (2025) menemukan bahwa implementasi MBG berdampak positif meskipun terdapat hambatan distribusi dan tenaga dapur. Secara umum, penelitian terdahulu lebih menekankan pada output program dan tantangan umum pelaksanaan, belum secara mendalam mengintegrasikan analisis implementasi kebijakan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian terbaru ini berfokus pada proses implementasi dan tata kelola MBG di Kecamatan Baranti dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan dan *good governance*. Berdasarkan hasil coding dan wawancara, dimensi sumber daya menjadi faktor paling dominan, didukung oleh responsivitas pelaksana dan komitmen yang tinggi dari sekolah maupun pengelola dapur. Temuan menunjukkan bahwa koordinasi lintas aktor berjalan cukup baik dan respons terhadap keluhan dilakukan secara cepat, meskipun transparansi eksternal seperti publikasi anggaran masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai dampak program, tetapi juga mengungkap bagaimana struktur birokrasi, sumber daya, partisipasi, dan

responsivitas berperan dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan MBG di tingkat lokal.

#### E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya efektivitas implementasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Baranti ditentukan oleh sinergi antara kapasitas implementasi kebijakan dan kualitas tata kelola pada tingkat satuan pendidikan. Dari perspektif implementasi kebijakan, komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi terbukti memengaruhi jalannya program, dengan sumber daya dan disposisi pelaksana sebagai faktor paling dominan dalam menjaga konsistensi distribusi, kualitas layanan, serta keberlanjutan pelaksanaan. Sementara itu, komunikasi yang masih bersifat informal dan struktur birokrasi yang relatif berlapis membatasi fleksibilitas serta kecepatan respons terhadap dinamika lapangan. Dari sisi tata kelola, pelaksanaan MBG telah mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas, namun penerapannya belum sepenuhnya terinstitusionalisasi secara formal, khususnya dalam aspek dokumentasi komunikasi, mekanisme umpan balik publik, dan perluasan partisipasi ke tahap pengambilan keputusan. Dengan demikian, keberhasilan MBG tidak dapat dijelaskan hanya melalui kecukupan sumber daya atau desain kebijakan semata, melainkan melalui integrasi antara dimensi operasional implementasi dan penerapan prinsip *good governance* secara konsisten dalam lingkup lokal. Penelitian ini mempunyai sejumlah batasan pada ruang lingkup studi kasus di satu kecamatan serta belum mengukur dampak kuantitatif program terhadap status gizi dan capaian akademik siswa, sehingga Penelitian berikutnya melalui jangkauan area lebih besar serta metode kombinasi dianjurkan guna memperkuat validitas dan generalisasi temuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, S. M., Teshoma, M. S., Ahmed, A. S. D., & Tamiru, D. (2024). Household food insecurity and its association with academic performance among primary school adolescents in Hargeisa City, Somaliland. *PLoS ONE*, *19*(7 July), 1–15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0303034>
- Agu, C. I., Ossai, E. N., Ogah, O. E., Agu, I. C., Akamike, I., Ugwu, G. O., ... Azuogu, B. N. (2023). An appraisal of the implementation of the national school feeding programme and its effect on enrolment and attendance in public primary schools in Southeast, Nigeria: perception of heads of schools. *BMC Nutrition*, *9*(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s40795-023-00695-z>
- Amiruddin Setiawan, Harti Purwanti, Hani Cahya Maulani, Fuzi Nurani Anggraeni, & Muhammad Andriana Gaffar. (2025a). Analisis Kebijakan SE Dirjen Pendis No. 10 Tahun 2024 Panduan Program Makan Bergizi Gratis di Lingkungan Pesantren: Implikasi terhadap Motivasi Belajar Santri. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, *5*(2), 341–355. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5796>
- Amiruddin Setiawan, Harti Purwanti, Hani Cahya Maulani, Fuzi Nurani Anggraeni, & Muhammad Andriana Gaffar. (2025b). Analisis Kebijakan SE Dirjen Pendis No. 10 Tahun 2024 Panduan Program Makan Bergizi Gratis di Lingkungan Pesantren: Implikasi terhadap Motivasi Belajar Santri. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, *5*(2), 341–355. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5796>
- Atikah Merlinda, A., & Yusuf, Y. (2025). Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Tinjauan dari Perspektif Sosiologi Pendidikan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *7*(2), 1364–1373.

- Canillo, M., & Alferez, R. (2025). School-Based Feeding Program: Its Contribution in Improving the Nutritional Status and Learning Outcomes of Beneficiaries. *Psychology and Education: A Multidisciplinary Journal*, 46(4), 445–459. <https://doi.org/10.70838/pemj.460405>
- Cupertino, A., Ginani, V., Cupertino, A. P., & Botelho, R. B. A. (2022). School Feeding Programs: What Happens Globally? *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(4), 2–12. <https://doi.org/10.3390/ijerph19042265>
- De Arruda Leite, J. P. (2016). *Individuals and social interactions in the institutionalization of public policy coordination*. Retrieved from <https://consensus.app/papers/individuals-and-social-interactions-in-the-leite/a5c31606a51e55cfb2ca61d6efc8ecb9/>
- Di Prima, S., Nguyen Dinh, D., Reurings, D. D., Wright, E. P., Essink, D., & Broerse, J. E. W. (2022). Home-Grown School Feeding: Implementation Lessons From a Pilot in a Poor Ethnic Minority Community in Vietnam. *Food and Nutrition Bulletin*, 43(3), 271–302. <https://doi.org/10.1177/037957212211088962>
- Drake, L., Woolnough, A., Burbano, C., & Bundy, D. (2016). Global School Feeding Sourcebook: Lessons from 14 countries. In *Global School Feeding Sourcebook: Lessons from 14 Countries*. London: Imperial College Press.
- Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in the third world. In *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/2619175>
- Hidayat, R., & Aminah, S. (2022). Analisis Implementasi Program Gizi di Sekolah Dasar: Tantangan dan Strategi. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 7(2), 115–128.
- Immaculee, I., & Amolo, A. E. J. (2025). Analysis of Project Management Practices on School Feeding Program Performance. *International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486)*, 14(1), 166–176. <https://doi.org/10.20525/ijfbs.v14i1.4025>
- John W. Creswell, J. D. C. (2018). Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches. In *Research Design* (Vol. 5). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Kania, I., Geusan, G., Raturahmi, L., Ulumudin, A., Rustiana, E., & Budiman, M. (2019). the Analysis of the Village Law Implementation Policy By Using Edward Iii Model Approach in Garut. *The International Seminar Series on Regional Dynamics Proceeding*. <https://doi.org/10.19184/issrd.v1i1.13735>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Odoh, T., Otto, G., Medee, P., & Nnamdi, K. C. (2024). School Feeding Programme, Smallholder Farmers, and Development of Rural Areas in Nigeria. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 24(11), 419–432. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i111567>
- Putra, E. V. (2020). Implementation of Public Accountability and Transparency at Non-Government Organizations at the Local Level. *Proceedings of the International Conference on Public Administration, Policy and Governance (ICPAPG 2019)*. Paris, France: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.222>
- Rhodes, R. A. W. (2017). The new governance: Governing without government. *From Government to Governance*, 44(4), 3–18.
- Sadag, M. D. D. (2025). The Extent Implementation of School Based Feeding Program: An Assessment among Elementary Schools in Kabugao District II, Philippines. *Journal of Education, Society and Behavioural Science*, 38(4), 60–76. <https://doi.org/10.9734/jesbs/2025/v38i41401>
- Satika, R., Salahuddin, Kasman, & Suraya. (2024). Implementation of Public Service Reform in Enhancing the Welfare of Bima District Community: Challenges and

- Opportunities. *Komunitas*, 15(1), 91–106.  
<https://doi.org/10.20414/komunitas.v15i1.9989>
- Susanto, A., Prasetyo, B., & Lestari, N. (2020). School Feeding Program and Its Impact on Student Health and Academic Performance. *International Journal of Public Health Research*, 10(2), 89–98.
- Tamiru, Y., Mulugeta, A., Ayelign, A., Jara, D., Melaku, E., & Gebremedhin, S. (2024). Perceived benefits and challenges of school feeding program in Addis Ababa, Ethiopia: A qualitative study. *Journal of Nutritional Science*, 13(10), 1–13.  
<https://doi.org/10.1017/jns.2024.42>
- Wahyudi, S., Ansar, A., Melmambessy, D., Afiyah, S., & Ariadi, W. (2024). Application of Good Governance Principles in Improving the Performance of Government Agencies: A Review of the Case of Developing Countries. *Global International Journal of Innovative Research*, 1(2), 168–174. <https://doi.org/10.59613/global.v1i2.31>
- Zakiah, S. U., GHANI, A. R. A., ISTARYATININGTIAS, I., & MURNI, S. (2021). Adiwiyata Program Implementation Evaluation. *JKP: Jurnal Kepemimpinan Pendidikan*, 4(1), 534–540. <https://doi.org/10.22236/jkpuhamka.v4i1.7470>